

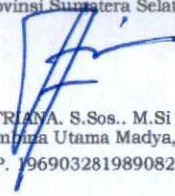
1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Perpustakaan
3. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Perpustakaan
4. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Perpustakaan
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- c. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam
- e. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya
- f. Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi
- g. Penyelenggaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data
- h. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
- i. Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan
- j. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan
- k. Penyelenggaraan pengembangan kebudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca
- l. Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No (1)	Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Satuan (4)	Definisi Operasional (5)	Rumus Penghitungan (6)	Sumber Data (7)	Penanggung Jawab (8)
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan dalam pembangunan literasi masyarakat dengan sumber daya yang memadai.	$IPLM = ((0.30 \times \text{Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Kinerja})) \times 100\%$ Dimensi sebagaimana terdiri atas: 1. Kepatuhan 1.1. Koleksi (a. Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam bentuk fisik dan digital yang dimiliki oleh perpustakaan b. Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca ditempat atau silang pinjam dalam satu tahun. c. Jumlah akses atau penggunaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital dalam satu tahun d. Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan dalam bentuk fisik, digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan e. anggaran pengembangan bahan perpustakaan baik fisik & digital dalam satu tahun) 1.2. Tenaga perpustakaan. (a. jumlah tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi pendidikan di bidang perpustakaan, b. jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga, c. jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian dalam satu tahun , d. jumlah anggaran pengembangan keprofesiab (diklat) tenaga perpustakaan 1 tahun) 2.1. Pelayanan (a. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi dalam 1 tahun b. jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan baik luring maupun daring dalam 1 tahun, c. jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas TIK dalam 1 Tahun. 2.2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan (a.jumlah program/kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi dalam 1 tahun (b) Jumlah kerjasama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal dalam meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan dalam 1 tahun, (c) jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan bentuk fisik, digital, d. jumlah dokumen kebijakan, pedoman dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan, e. jumlah anggaran peningkatan layanan dan pengelolaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
		1.2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM)	Nilai	Merupakan kajian yang dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting guna memahami dan meningkatkan budaya membaca yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan peningkatan minat baca yang bertujuan memenuhi kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Dimensi sebagaimana terdiri atas: 1. Pra membaca 1.1 Motivasi Membaca (a. Minat Membaca Intrinsik, b. Tujuan Membaca, c. Keyakinan Diri, d. Motivasi Ekstrinsik), 1.2 Model Akses dan Kebiasaan Membaca (a. Ketersediaan Bahan Bacaan, b. Frekuensi Membaca Sebelumnya, c. Durasi Membaca, d. Lingkungan Mendukung.) 1.3 Pembelajaran Sosial (a. Modeling orang tua, b. Pengarahan tokoh publik, c. Pengaruh Teman Sebaya, d. Sosialisasi Literasi), 1.4 Konsep Budaya Literasi (a. Nilai Sosial terhadap Membaca, b. Norma Budaya Membaca, c. Partisipasi Komunitas, d. Akses ke Media Budaya 2. Saat Membaca 2.1 Perilaku Membaca (a. Fokus Perhatian, b. Strategi Pemahaman, c. Interaksi Dengan Teks, d. Pemantauan Pemahaman.) 2.2 Literasi Sosial (a. Diskusi Teks, b. Kolaborasi membaca, c. Negosiasi makna, d. Praktik sosial kontekstual.) 3. Pasca Membaca 3.1 dampak membaca (a. Perkembangan kognitif, b. Perkembangan sosial, c. Perkembangan emosional.) 3.2 Nilai Harapan (a. Ekspektansi keberhasilan, b. Nilai tugas.)	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel	Tingkat Implementasi E-SAKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel	Nilai	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik pada suatu perangkat daerah, yang menggambarkan kemampuan OPD dalam mengintegrasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Komponen Sakip yang terinput pada E-SAKIP sesuai standar}}{\text{Jumlah Seluruh Komponen E-SAKIP}} \times 100\%$	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
---	---	---	-------	--	--	--	--

Palembang, Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan


FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP. 196903281989082002